

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Oleh:

Rano Asoka

STIE Rahmadiyah Sekayu

Email : ranoasoka09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa. sehingga dapat dikategorikan efektif hanya saja pengaruhnya adalah Penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.

Kata Kunci : *Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi kita semua. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogenya sistem mata pencarian penduduknya sebagai petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya, sehingga muncullah istilah desa nelayan, desa perkebunan, dan desa peternakan.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam

satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Desa Tanjung Bali adalah salah satu desa dari 227 desa dan 15 Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin yang terletak di Kecamatan Batanghari Leko dan mendapat Dana Desa tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp.788.446.000,-. Besarnya dana yang diperoleh Pemerintah Desa Tanjung Bali menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan Penggunaan Dana Desa. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari aktor pelaksanaannya maupun teknis pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparatur desa sebagai aktor pengelolaan dana di sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang minim kualitasnya Kebijakan Penggunaan Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa Tanjung Bali tahun 2017.

Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa Tanjung Bali dianggarkan dalam Belanja Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa. Namun realita kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2017 di Desa Tanjung Bali mengalami keterlambatan Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Ditambah lagi oleh faktor sekitar yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di lapangan hal tersebut terlihat pada data tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Pemerintah Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Total Pendapatan	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2015	Rp.572.628.000	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (5%)	28.631.400	28.631.400	-	100%	Efektif
		-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (80%)	458.102.400	458.102.400	-	100%	Efektif
		-Bidang Pemberdayaan Masyarakat (15%)	85.894.200	85.894.200	-	100%	Efektif
Jumlah			572.628.000	572.628.000	-	100%	Efektif
2016	Rp. 620.210.000	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (5%)	31.010.500	31.010.500	-	100%	Efektif
		-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (80%)	496.168.000	481.258.000	14.910.000	97%	Efektif
		-Bidang Pemberdayaan Masyarakat (15%)	93.031.500	91.231.500	1.800.000	98%	Efektif
Jumlah			620.210.000	603.500.000	16.710.000	97%	Efektif
2017	Rp.788.446.000	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (60%)	473.067.600	425.897.600	47.170.000	90%	Efektif
		-Bidang Pemberdayaan Masyarakat (40%)	315.378.400	311.872.400	3.506.000	98%	Efektif
Jumlah			788.446.000	737.770.000	50.676.000	94%	Efektif
Total			1.981.284.000	1.913.898.000	67.386.000	96%	Efektif

Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan persentase Realisasi Anggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Pengalokasian Dana Desa dapat terserap dengan efektif 100% sesuai dengan perencanaan, sedangkan pada tahun 2016 dana yang terserap 97% dan Tahun Anggaran 2017 pencapaian hanya 94%. Dilihat dari laporan realisasi anggaran pengelolaan dana desa persentase pencapaiannya menurun pada bidang pembangunan dan pemberdayaan hal ini dijelaskan oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali dikarenakan Proses penyusunan rencana anggaran yang kurang tepat sehingga menimbulkan silpa seperti pada kegiatan Bimbingan Tekhnis Pemberdayaan Masyarakat besarnya dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan pengeluaran pada saat belanja desa, adapun di bidang pembangunan dijelaskan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Persentase pencapaian menurun disebabkan oleh pencairan dana desa pada waktu yang tidak tepat dalam hal ini kondisi alam yang menjadi hambatan desa untuk mengangkut bahan materian dari toko menuju desa, Hal ini menunjukkan adanya fenomena bahwa proses pengelolaan dan pengendalian anggaran Dana Desa pada desa Tanjung Bali tersebut dalam sistem dan prosedurnya masih kurang efektif.

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran yang selanjutnya dilakukan untuk pemutakhiran data pada aplikasi *software* (SISKEUDES) pada periode berjalan, dan tidak hanya itu akibat keterlambatan penyampaian laporan realisasi anggaran tersebut Desa akan mendapatkan Sanksi dari KPPN berupa Penundaan Pencairan Dana. Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko”

KERANGKA TEORI

Pengertian Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pengertian Dana Desa

Dana Desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/ kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Penatausahaan

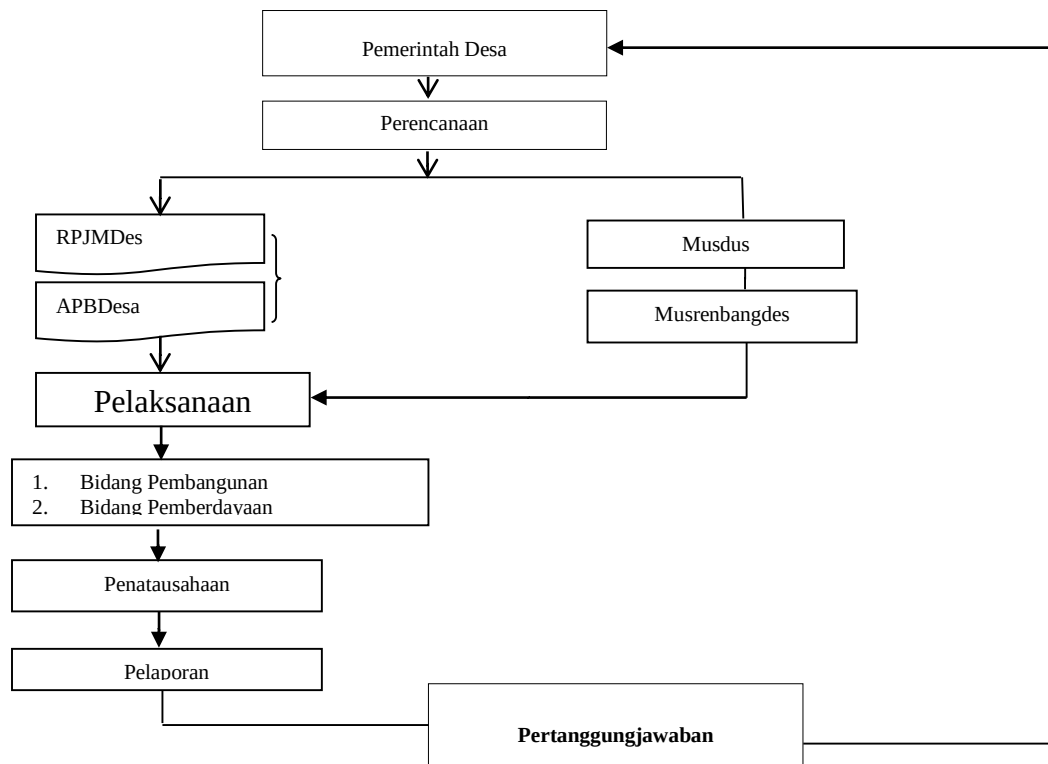
Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bendahara desa. Permendagri No.113 Tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, salah satu lampiran dalam laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa, oleh karenanya laporan kekayaan milik desa awal wajib dibuat. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan kekayaan milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintah desa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan melakukan inventarisasi atas pos-pos yang ada di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Inventarisasi dapat dilakukan secara fisik melalui catatan, laporan, ataupun dokumen sumber lainnya.

Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam penyusunan tulisan ini, maka Penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Noor (2011: 138), teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik.

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui teori yang telah dipelajari

pada saat kuliah, buku-buku, pedoman dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data digunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

Siklus Perencanaan dan Penganggaran Desa

Pada Desa Tanjung Bali Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah desa melalui Musyawarah setiap Dusun lalu dituangkan pada musyawarah Desa untuk diprioritaskan Kegiatan yang dibutuhkan desa, Lalu diadakan kembali musyawarah desa dengan mengundang Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Bali, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat, Toko Masyarakat, Toko Adat dan sebagainya yang terkait dalam desa Guna mengikuti Penyusunan Anggaran Dana Desa sesuai prioritas desa, yang selanjutnya akan dituangkan pada dokumen desa berupa RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Siklus Pelaksanaan Dana Desa

Pada siklus perencanaan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali dilaksanakan sesuai dengan bidang kegiatannya yang tertuang pada APBDesa. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pelaksanaan Keuangan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali dilaksanakan pada tiga bidang kegiatan yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan pada Tahun 2017 Pelaksanaan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali dilaksanakan hanya pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali yaitu mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan: Buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Yang dilakukan pencatatan oleh Tim Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Tanjung Bali.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Tanjung Bali setiap akhir tahun anggaran melaporkan kekayaan aset desa dan membuat laporan Realisasi anggaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada bupati melalui kecamatan dan dinas BPMPD Kabupaten Musi Banyuasin.

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko

Dalam proses pelaksanaan Dana Desa tentunya terlebih dahulu diawali oleh pencairan dana desa oleh Pemerintah desa Tanjung Bali, Realisasi pencairan dana desa dilakukan dalam II Tahap. Pencairan pertama senilai 40% dan kedua 60% dari pagu dana yang telah ditetapkan.

Dalam pembagian persentase penggunaan dana desa di Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 dan 2016 Dana Desa dibagi menjadi tiga bidang kegiatan yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5%, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 80%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 15%. Sedangkan Pada tahun 2017 Pembagian Dana Desa pada desa Tanjung Bali hanya pada dua bidang kegiatan yaitu, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 60%, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 40%. Perubahan pembagian bidang dan persentase dana desa dijelaskan oleh Pemerintah desa Tanjung Bali sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kabupaten.

Perhitungan dan penyajian Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk penyajian Dana Desa di Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun Anggaran 2015

Sumber dana : DD Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	572.628.000	572.628.000	0,00
1.2.1.	Dana Desa	572.628.000	572.628.000	0,00
	Jumlah Pendapatan	572.628.000	572.628.000	0,00
2.	BELANJA			
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>28.631.400</u>	<u>28.631.400</u>	<u>0,00</u>
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.500.000	5.500.000	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	10.630.000	10.630.000	0,00
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	6.000.000	6.000.000	0,00
2.1.10	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	6.501.400	6.501.400	0,00
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>458.102.400</u>	<u>458.102.400</u>	<u>0,00</u>
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	458.102.400	8.925.000	0,00
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000	8.925.000	0,00
2.2.1.2.23.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan	8.925.000	8.925.000	0,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	449.177.400	449.177.400	0,00
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	449.177.400	449.177.400	0,00
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>85.894.200</u>	<u>85.894.200</u>	<u>0,00</u>
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD & LPM	30.394.200	30.394.200	0,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	23.500.000	23.500.000	0,00
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32.000.000	32.000.000	0,00
	JUMLAH BELANJA	572.628.000	572.628.000	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat pada Tahun 2015 Desa Tanjung Bali mendapatkan alokasi Dana APBN sebesar Rp.572.628.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dengan Pembagian Persentase 5% atau senilai Rp.28.631.400,- untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari kegiatan Musyawarah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Informasi Desa, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa, 80% atau senilai Rp.458.102.400,- untuk kegiatan Pembangunan Desa seperti pada tabel diatas Pemerintah Desa Tanjung Bali sepakat untuk menggunakan dana tersebut pada kegiatan pembangunan Saluran Irigasi/Parit dan 15 % atau senilai Rp.85.894.200,- untuk Bidang Pemberdayaan pemerintah desa yaitu untuk Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPM Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Tani dan Nelayan.

Besarnya Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali pada Tahun 2015 nampaknya dapat dipergunakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali dan Tim Pelaksana Kegiatannya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun berjalan. Suksesnya Penggunaan Dana Desa tersebut juga dikemukakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ada beberapa faktor-faktor pendukung diantaranya Pada bidang Pembangunan Desa Kondisi Alam yang sangat mendukung pada tahun 2015 Waktu Pencairan Dana Desa bertepatan dengan musim kemarau sehingga mudah untuk memasukkan material dari Toko menuju Desa dan Pengawasan serta bimbingan yang baik dari Pendamping Desa dalam Melaksanakan Perencanaan Desa.

Tabel 3.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari LekoTahun Anggaran 2016

Sumber dana : DD Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	620.210.000	603.500.000	16.710.000
1.2.1.	Dana Desa	620.210.000	603.500.000	16.710.000
	Jumlah Pendapatan	620.210.000	603.500.000	16.710.000
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	31.010.500	31.010.500	0,00
2.1.5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.500.000	4.500.000	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	7.250.000	7.250.000	0,00
2.1.7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	7.800.000	7.800.000	0,00
2.1.10	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	11.460.500	11.460.500	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	496.168.000	496.168.000	14.910.000
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	341.140.000	331.725.000	9.415.000
2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.822.900	6.822.900	0,00
2.2.1.2.23.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan	6.822.900	6.822.900	0,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	334.317.100	324.902.100	9.415.000
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	334.317.100	324.902.100	9.415.000
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	115.544.300	115.544.300	0,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.800	2.310.800	0,00
2.2.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	510.800	510.800	0,00
2.2.1.2.23.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan	1.800.000	1.800.000	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	113.233.500	113.233.500	0,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	113.233.500	113.233.500	0,00
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	39.483.700	33.988.700	5.495.000
2.2.16.2	Belanja Barang dan Jasa	789.700	789.700	0,00
2.2.16.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	789.700	789.700	0,00
2.2.16.3	Belanja Modal	38.694.000	33.199.000	5.495.000
2.2.16.3.26	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	38.694.000	33.199.000	5.495.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	93.031.500	93.031.500	1.800.000
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD & LPM	29.370.000	29.370.000	1.800.000
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	26.770.000	26.770.000	0,00
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15.985.000	15.985.000	0,00
2.4.5	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	20.906.500	20.906.500	0,00
	JUMLAH BELANJA	620.210.000	603.500.000	16.710.000
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	16.710.000	(16.710.000)
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	16.710.00	16.710.00

Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah

Dari tabel 3. di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 Desa Tanjung Bali mendapatkan alokasi Dana APBN sebesar Rp.620.210.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Meningkatnya Dana Desa pada Desa Tanjung Bali tentu saja membuat pemerintah Desa Tanjung Bali lebih memperhatikan prioritas yang dibutuhkan oleh desa dan Masyarakat desa Tanjung Bali, Pembagian Persentase penggunaan dana desa pada tahun 2016 masih sama seperti tahun 2015 yaitu, 5% atau senilai Rp.31.010.500,- untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Pengelolaan Informasi Desa dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa, 80% atau senilai

Rp.496.168.000,- untuk kegiatan pembangunan desa dengan kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi, Pembangunan Jalan Desa dan Jembatan Desa dan 15% atau senilai Rp.93.031.500,- untuk Bidang Pemberdayaan pemerintah desa yaitu untuk Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPM Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Tani dan Nelayan.

Pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah Pusat maupun daerah lebih menegaskan Pembangunan pada Infrastruktur dalam Desa hal tersebut bertujuan untuk mengurangi desa tertinggal. Dengan demikian pemerintah desa Tanjung Bali dalam pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2016 sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip dana desa yang ada, hanya saja beberapa faktor yang menghambat realisasi Anggaran sehingga waktu penyelesaian tidak tepat dengan yang telah direncanakan sebelumnya seperti pada tabel 4.2. diatas pada bidang Pembangunan terjadi lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp.14.910.000 yang disebabkan oleh Kondisi Alam yang kurang mendukung dalam pelaksanaan anggarannya dan Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 1.800.000,- yang merupakan Honorium Narasumber yang berhalangan hadir pada saat Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPM dilihat pada laporan realisasi Desa Tanjung Bali per 31 Desember 2016, Total Silpa pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.16.710.000,- yang selanjutnya dikembalikan ke Rekening Desa untuk dianggarkan kembali pada APBDesa Tahun berikutnya.

Tabel 4.Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari LekoTahun Anggaran 2017

Sumber dana : DD Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	788.446.000	737.770.000	50.676.000
1.2.1.	Dana Desa	788.446.000	737.770.000	50.676.000
	Jumlah Pendapatan	788.446.000		
2.	BELANJA			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	487.977.600	487.977.600	47.170.000
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi	9.415.000	9.415.000	0,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	9.415.000	9.415.000	0,00
2.2.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	9.415.000	9.415.000	0,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	377.354.400	377.354.400	47.170.000
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.910.400	6.910.400	0,00
2.2.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000	510.000	0,00
2.2.2.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak & Pengadaan	25.400	25.400	0,00
2.2.1.2.23.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan	6.375.000	6.375.000	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	370.444.000	370.444.000	47.170.000
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	370.444.000	370.444.000	47.170.000
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	95.713.200	95.713.200	0,00
2.2.12.2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000	2.550.000	0,00
2.2.12.2.23	Belanja Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan	2.550.000	2.550.000	0,00
2.2.12.3.	Belanja Modal	93.163.200	93.163.200	0,00
2.2.12.2.23	Belanja Modal Pengadaan Intalasi Listrik dan Telepon	5.000.000	5.000.000	0,00
2.2.12.3.42	Belanja Modal Pengadaan Sarana Air Bersih Skala Desa	88.163.200	88.163.200	0,00
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	5.495.000	5.495.000	0,00
2.2.16.3	Belanja Modal	5.495.000	5.495.000	0,00
2.2.16.3.28	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	5.495.000	5.495.000	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	193.778.500	193.778.500	3.506.000
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD & LPM	51.438.500	51.438.500	200.000
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	37.424.000	37.424.000	0,00
2.4.13	Kegiatan Bimbingan Tekhnis Masyarakat	55.800.000	55.800.000	3.306.000
2.4.16	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	7.250.000	7.250.000	0,00
2.4.17	Kegiatan Informasi Desa	15.000.000	15.000.000	0,00
2.4.18	Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa	11.866.000	11.866.000	0,00
2.4.19	Kegiatan Pembinaan Organisasi/Kelompok Perempuan	15.000.000	15.000.000	0,00
	JUMLAH BELANJA	681.756.100	631.080.100	50.676.000
	SURPLUS/ (DEFISIT)	106.689.900	157.365.900	(50.676.000)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.710.000	16.710.000	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	16.710.000	16.710.000	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	123.399.900	123.399.900	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	123.399.900	123.399.900	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(106.689.900)	(106.689.900)	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	50.676.000	(50.676.000)

Sumber: Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko Tahun 2018, data diolah

Pada Tabel 4. diatas dapat dilihat Dana Desa Tahun anggaran 2017 pada desa Tanjung Bali sebesar Rp. 788.446.000,- (Tujuh Ratus Delapan puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Besarnya dana desa yang diperoleh dihitung

berdasarkan Luas wilayah desa dan Banyaknya Penduduk Desa. Namun demikian pada Tahun 2017 Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal pembagian penggunaan Dana Desa mengalami perubahan yaitu dibagi 60% atau senilai Rp.473.067.600,- untuk bidang Pembangunan dengan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dan Sumur Bor dan 40% atau senilai Rp.315.378.400,- Bidang Pemberdayaan untuk kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM Desa, Kegiatan Bimbingan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Informasi Desa, Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa, kegiatan Kelompok Perempuan Desa dan Pembiayaan Kelompok Usaha Mulik Desa (BUMDesa), untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak dianggarkan dalam Dana Desa (APBN) dikarenakan pembiayaannya sudah termasuk dalam Alokasi Dana Desa Kabupaten (ADD/K) dan untuk silpa Tahun sebelumnya akan dianggarkan kembali pada APBDDesa tahun berjalan guna meneruskan Kegiatan yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Hal tersebut juga Pemerintah bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan Infrastruktur desa pada Tahun 2017 namun Lebih kepada Sumber Daya Manuasianya (SDM) oleh karena itu pada bidang Pemberdayaan pemerintah desa dianggarkan dari 15% menjadi 40% dari pagu dana yang diperoleh tahun berjalan.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Tanjung Bali telah bersepakat bersama BPD, LPM dan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Musyawarah Desa pada bidang pembangunan akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, dan Sarana Air Bersih (Sumur Bor) namun dalam pelaksanaannya dikarenakan faktor Alam yang kurang mendukung saat pelaksanaan dana desa sehingga Tingkat efektivitas pencapaian Dana Desa pada Desa Tanjung Bali kembali menurun pada laporan akhir tahun berjalan sehingga menyebabkan silpa Ongkos Angkut pada Bidang Pembangunan Sebesar Rp.47.170.000,- dan Bidang Pemberdayaan sebesar Rp.3.506.000,- pada kegiatan Bimbingan Tekhnis Pemberdayaan Masyarakat, Jadi total silpa tahun 2017 sebesar Rp.50.676.000,- yang selanjutnya akan dikembalikan pada rekening desa untuk dianggarkan pada APBDDesa tahun berikutnya.

Analisis Efektivitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (APBN)

Berdasarkan indikator efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Dana Desa pada Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko instrumen penelitian yang digunakan penulis adalah wawancara.

Tabel 5. Indikator Efektivitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa di bidang kegiatannya pada Desa Tanjung Bali

Indikator	Sasaran	Hasil Pencapaian
Pencapaian tujuan yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Dilihat dari adanya usaha kelompok perempuan dan Badan usaha milik desa pada tahun 2017
	2. Meningkatkan infrastruktur pembangunan	Adanya Pembangunan Siring/ Jalan cor beton dalam desa, sarana air bersih dsb.
	3. Meningkatkan kapasitas Masyarakat	Dilihat dari adanya pelatihan dan penyuluhan
Perencanaan yang matang yaitu suatu proses rencana yang disusun sedemikian rupa supaya dapat memberikan hasil yang maksimal	1. Adanya Musyawarah Desa	Mengadakan forum Musrenbangdes
	2. Melibatkan unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat	Dilihat dari tingkat kehadiran dalam Musrenbangdes
Penyusunan program yang tepat yaitu program yang direncanakan harus tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan.	1. Berdasarkan Peraturan daerah dan Permendagri	Pemerintah desa Tanjung Bali mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
	2. Sesuai dengan Keadaan Desa	Sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa Tanjung Bali
Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik yaitu dalam melakukan pengawasan dan kontrol harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan norma-norma	1. Keikutsertaan masyarakat	Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan dana desa
	2. Adanya konsultan pendamping/ pendamping desa	Adanya struktur tim kerja dan konsultan pendamping dari kabupaten
	3. Adanya Audit	Adanya pemeriksaan Tim auditor dari kabupaten baik secara administrasi maupun lapangan, yang bersifat mengarahkan pengelolaan dana desa sesuai dengan asas pengelolaannya.

Sumber : Indikator Efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran dana desa pada desa Tanjung Bali Tahun 2018

Untuk lebih jelasnya penulis menjabarkan Tabel 5 diatas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan DD dilihat dari kejelasan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali dalam upaya pemanfaatan Dana Desa. Adapun tujuan dari Pemerintah Desa Tanjung Bali yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas masyarakat desa Tanjung Bali. Strategi yang jelas menjadi tolak ukur kontribusi setiap aspek yang bertanggung jawab serta menjadi tolak ukur dalam keberhasilan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya guna tercapainya peningkatan bagi perekonomian dan pembangunan desa Tanjung Bali baik dalam segi pemberdayaan masyarakat. Dalam membuat suatu strategi Pemerintah Desa Tanjung Bali melihat dari apa saja masalah dan potensi yang ada di desa Tanjung Bali.

2. Perencanaan yang Matang

Perencanaan merupakan kunci mensukseskan segala program yang akan dilaksanakan, dengan adanya perencanaan yang baik maka segala program dan kegiatan akan mendatangkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan ditandai dengan adanya Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta komponen masyarakat. Seluruh peserta musdes berhak untuk memberikan usulan dan mengajukan kritik serta saran terhadap rencana sasaran DD. Dilihat dari laporan pertanggung jawaban DD dari tahun 2015-2017 terlihat jelas bahwa aparat desa Tanjung Bali sudah melakukan perencanaan atau sasaran dalam pembiayaan DD untuk pembiayaan kegiatan setiap bidangnya.

3. Penyusunan Program yang Tepat

Keberhasilan pencapaian tujuan tidak terlepas dari program yang akan dilakukan guna pengembangan, Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Penyusunan dan pelaksanaan program yang tepat akan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Tanjung Bali. Adapun program Pemerintah Desa Tanjung Bali berdasarkan hasil dari musrenbangdes meliputi : pada bidang Pembangunan yaitu peningkatan pembangunan air bersih/sanitasi dilihat adanya pembangunan sumur bor dan jalan desa untuk memperlancar aktivitas masyarakat, dan pada bidang pemberdayaan masyarakat program prioritas pemerintah desa Tanjung Bali lebih kepada peningkatan kapasitas Pemerintah desa dan masyarakat desa dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan setiap tahunnya.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat mendidik

Salah satu fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan. Mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumberdaya dipergunakan secara efektif dan efisien. Apabila anggaran dana desa dapat dikelola dengan baik dan jujur maka tidak menutup kemungkinan program yang direncanakan akan meningkatkan pelayanan publik partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan meningkat dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Bali.

Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Belanja Desa Tanjung Bali

Implementasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa di desa Tanjung Bali kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dari sisi perencanaan Dana Desa sudah cukup baik karena dalam perencanaan DD terlihat telah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi. Hal ini dapat dilihat mulai dari perencanaan DD yang

dilakukan melalui musyawarah setiap dusun, dilanjutkan dengan musyawarah desa dan dituangkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (murenbangdes) dimana dalam forum tersebut mengundang seluruh perangkat desa sekaligus pemuka-pemuka agama tokoh-tokoh masyarakat guna memberikan pendapat demi pencapaian tujuan pembangunan desa yang merata. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari forum Musrenbangdes yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa (P3MD) dimana dalam forum tersebut terdapat informasi yang jelas tentang anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan dalam pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan: 1) dalam pengelolaan keuangan dana desa pada desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa, dengan menggunakan asas partisipatif masyarakat yang terlihat dari dukungan masyarakat dalam musyawarah desa transparansi Pemerintah Desa Tanjung Bali yang terlihat dari sistem penganggaran Dana Desa dengan melibatkan beberapa lembaga desa serta akuntabilitas Pemerintah desa Tanjung Bali telah bertanggungjawab dalam pelaksanaannya dari Perencanaan hingga pada pelaporan pertanggungjawaban dana desa, 2) dalam pelaksanaannya dilihat dari laporan penyerapan dana desa pada desa Tanjung Bali pada tahun 2016 mengalami Silpa dana desa sebesar Rp.16.710.000,- dan tahun 2017 Silpa sebesar Rp.50.676.000,- sehingga tingkat efektivitas pengelolaan keuangan dana desa menurun, hal tersebut terlihat pada bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa. pada Bidang Pembangunan yang disebabkan oleh curah hujan yang terjadi secara terus-menerus sehingga sulitnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mengangkut material Pembangunan dari Toko menuju Desa dan pada Bidang Pemberdayaan Desa Permasalahan yang terjadi pada sistem perencanaan desa dijelaskan oleh Sekretaris Desa Tanjung Bali Sering terjadi kesalahan penetapan harga pada perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan harga pada saat Belanja hal tersebut dikarenakan Standar Harga yang menjadi acuan dari kabupaten sering berubah dan lambat disosialisasikan ke desa. Walaupun demikian Pengelolaan Dana Desa pada Desa Tanjung Bali masih dikatakan efektif hanya saja pengaruhnya adalah Penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.

Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang- Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang ketentuan desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 tentang jenis desa